

# **BIROKRASI RESPONSIF DALAM *LOCAL-GOOD GOVERNANCE***



Pidato

Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar  
dalam Bidang Ilmu Politik Lokal  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga  
di Surabaya pada Hari Sabtu, Tanggal 13 September 2014

Oleh

**BUDI PRASETYO**



Printing by  
Airlangga University Press (AUP)  
OC 153/09.14/B65E

*Yang terhormat,*

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga,  
Rektor, dan Para Wakil Rektor Universitas Airlangga,  
Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga,  
Para Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga,  
Para Pimpinan Lembaga dan UPT di Lingkungan Universitas Airlangga,  
Para Guru Besar dan Guru Besar Tamu,  
Para Dosen dan Sivitas Akademika Universitas Airlangga, dan  
Para hadirin yang berbahagia

*Assalamu'alaikum warochmatulloohi wabarokatuh*

Izinkan saya pada hari yang berbahagia ini, untuk mengucapkan puji syukur ke hadapan Allah swt., yang telah memberikan tuntunan dan rahmat kepada kami sekeluarga sehingga saya dapat berdiri di Ruang Sidang yang sangat terhormat ini, untuk menyampaikan Pidato Pengukuhan saya sebagai Guru Besar di bidang ilmu Politik Lokal dengan judul:

**BIROKRASI RESPONSIF DALAM  
LOCAL-GOOD GOVERNANCE**

*Hadirin yang saya hormati,*

Berkah reformasi politik di Indonesia yang semakin dirasakan oleh masyarakat di penjuru Indonesia adalah menguatnya desentralisasi dalam mewujudkan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Banyak kebijakan sekarang ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Otonomi daerah menciptakan rentang kendali yang semakin pendek antara pemerintah dengan masyarakatnya

sehingga banyak kebijakan yang dulunya harus menunggu petunjuk pemerintah pusat sekarang cukup diselesaikan oleh pemerintah daerah. Keuntungannya adalah terwujudnya efisiensi waktu, tenaga, anggaran dan penyelesaian masalah yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah.

Di berbagai daerah di Indonesia, prestasi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pelayanan publiknya sudah terbukti mampu meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus meningkatkan legitimasi pemerintah daerah. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan program JALINKESRA (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat), meskipun dalam implementasi dan evaluasinya ada banyak kritik tetapi harus diakui program pembangunan yang memihak terhadap afirmasi kesejahteraan bagi masyarakat kecil tersebut membawa dampak yang luar biasa terhadap ketahanan hidup masyarakat, terutama masyarakat miskin di Jawa Timur. Hal ini mengukuhkan legitimasi Gubernur Jawa Timur sekarang ini dengan sebutan "Pakdhe Karwo" yang dimaknai sebagai sesepuh yang dianggap sebagai penyelesai masalah.

Konsistensi dan kerja keras Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan ruang publik dengan banyak membangun fasilitas-fasilitas seperti taman, trotoar, rekayasa akses mobillitas masyarakat telah terbukti mampu menempatkan Kota Surabaya sebagai kota yang menghargai harkat dan martabat masyarakat dalam melaksanakan aktivitas hidupnya sekaligus menempatkan walikota Surabaya bersama jajaran pemerintahannya dicintai dan memperoleh pengakuan yang tinggi dari masyarakat.

Inovasi dalam pelayanan perizinan di berbagai pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia, mulai dari program pelayanan perizinan terpadu, program pelayanan perizinan satu atap bahkan di Kabupaten Sidoarjo dan Gresik telah diproklamirkan program pelayanan perijinan satu pintu

telah terbukti mampu memangkas berbagai stigma birokrasi pemerintahan daerah yang dahulu terkesan lambat, berbelit-belit, tumpang tindih, mahal, tidak transparan dan tidak ramah, yang secara perlahan berubah menjadi birokrasi yang bersih, cepat, transparan, murah, ramah serta efisien dan efektif.

Banyuwangi, sebagai kabupaten paling timur di Jawa Timur yang selama ini tidak banyak dibahas dalam kinerja pemerintahannya, sekarang ini sudah berkembang menjadi kabupaten modern berkat kebijakan seribu *wifi* di seluruh pelosok kabupaten. Program ini berimplikasi luas, di samping meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi khususnya via internet juga mampu mendongkrak berbagai prestasi masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jaringan hubungan ekonomi produktif melalui pengembangan usaha ekonomi kreatifnya.

Dalam hal pendidikan di era otonomi ini pelayanan pendidikan gratis 9 tahun dan sekarang menjadi gratis 12 tahun yang sebenarnya sudah didanai oleh pemerintah pusat melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS) namun untuk menyukseskan program tersebut dan untuk menutupi kekurangan biaya riil di lapangan, beberapa pemerintah daerah seperti Kota Surabaya, Kota Mojokerto dan lainnya berinisiatif menutupi kekurangan tersebut melalui program BOSKo/BOSDA (BOS Kota/BOS Daerah) sehingga pelayanan pendidikan gratis tersebut menjadi optimal karena dukungan sinergis antara BOS dan BOSKo/BOSDA.

Di daerah lain banyak inovasi-inovasi kebijakan yang muncul sebagai bentuk kebijakan yang cerdas bagi peningkatan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat, seperti program kesehatan gratis yang sekarang banyak diadopsi oleh berbagai pemerintah daerah sebenarnya justru bermula pada tahun 2009 dari Kabupaten Sinjai sebuah kabupaten hasil pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara. Program asuransi pertanian yang

mendukung kestabilan hasil produksi pertanian, diawali oleh Kabupaten Jembrana Bali dan sebagainya.

*Bapak dan Ibu, hadirin yang saya hormati,*

Masih banyak contoh *best-practice* yang berhasil diproduksi sebagai kebijakan yang cerdas oleh pemerintah daerah berbagai tempat di Indonesia yang tidak dapat saya deskripsikan secara menyeluruh. Intinya, saya ingin menunjukkan bahwa dalam 16 tahun perjalanan reformasi politik dan pemerintahan di Indonesia ini sudah banyak kisah sukses peningkatan kinerja pelayanan publik pemerintah yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di sisi lain kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak harapan masyarakat yang belum dilaksanakan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah di Indonesia. Harapan ini wajar karena reformasi politik yang sekaligus berarti peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek baik di masyarakat maupun pemerintahan, dituntut untuk semakin responsif dan semakin profesional dalam melaksanakan tata pemerintahannya termasuk manajemen publik (birokrasi).

Di era reformasi ini manajemen publik dituntut untuk melakukan pembenahan seiring dengan reformasi politik dan ekonomi di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya menyangkut persoalan TUPOKSI atau pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, lebih dari itu pembenahan ini menyangkut perubahan yang komprehensif dimulai dengan perubahan paradigma manajemen publik yang akan berpengaruh kepada perubahan tata pemerintahan secara keseluruhan.

*Bapak dan Ibu, hadirin yang saya hormati,*

Era baru dalam manajemen publik pascareformasi ini adalah era penerapan paradigma *New Public Management* (NPM) dalam kinerja birokrasi pemerintahan di Indonesia. Paradigma pemerintahan ini merupakan kritik dan revisi atas pelaksanaan *The Old Public Administration* (OPA) yang diterapkan di birokrasi Indonesia pada era sebelum reformasi.

Sekedar mengingatkan bahwa pada paradigma *Old Public Management* di era Indonesia Orde Baru, birokrasi dijalankan secara profesional dalam arti teknis administratif, bersifat a-politis dan anomi. Birokrasi merupakan mesin yang efektif dan sistematis, bekerja berdasar juklak dan juknis sehingga prosedur menjadi acuan utama yang terkesan kaku dan tidak adaptif.

Birokrasi sangat kuat sehingga efektif untuk mendukung kekuasaan atau bahkan menjadi penguasa itu sendiri. Birokrasi menjadi alat bagi politik yang dominan dan bahkan menjadi kekuatan politik itu sendiri. Hubungan masyarakat dan birokrasi menjadi jauh dan formal, sehingga birokrasi yang seharusnya menjadi pelayan (abdi) masyarakat seringkali justru minta pelayanan dari masyarakatnya. Oleh karena itu dikenallah istilah birokrasi yang seharusnya menjadi *pamong praja* (abdi masyarakat) menjadi *pangreh praja* (penguasa masyarakat).

Kondisi ini didukung oleh rezim Orde Baru yang hegemonik sehingga kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan lebih banyak bersifat *top-down*, intervensif, homogen dari pusat ke seluruh wilayah Indonesia tanpa memperhatikan dinamika karakteristik wilayah dan budayanya.

Dalam banyak hal gaya kebijakan di masa Orde Baru ini berhasil dijalankan secara efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang membanggakan meskipun kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan secara represif.

Pada masa ini, dengan alasan menjaga stabilitas politik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kesejahteraan masyarakat, kekuasaan negara melalui aparat birokrasi berhasil dikonsolidasikan sedemikian rupa sehingga relatif otonom terhadap kekuatan-kekuatan di luar dirinya seperti partai politik dan berbagai kelompok kepentingan massa, termasuk terhadap intervensi internasional secara langsung maupun tidak langsung.

Alasan menjaga ideologis (ancaman terhadap Pancasila), stabilitas politik (potensi konflik, gangguan keamanan, disintegrasi), kemajuan kultural (mengejar modernitas, ketertinggalan pendidikan, teknologi dan aspek modernitas lainnya), pragmatisme ekonomi (desakan kemiskinan, pengangguran, produktivitas rendah), negara berhasil mengonsentrasikan dan memonopoli hampir segala jenis sumber kekuasaan seperti: interpretasi ideologis, kekuatan militer, dominasi politik, kooptasi kelompok intelektual dan penguasaan sumber-sumber ekonomi.

Alasan demi "kesuksesan pembangunan", dinamika ekonomi, politik, dan sosial masyarakat hampir sepenuhnya berlangsung di bawah kendali pemerintah pusat. Negara kuat di masa orde baru ini bahkan telah memperoleh reputasi sebagai negara pembangunan (*developmental state*), yang khususnya bersama beberapa negara di Asia dinilai telah menghasilkan keajaiban atau mukjizat ekonomi Asia (*Asian miracles*).

Desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah pada saat itu hanya formalisme belaka, faktanya adalah penerapan sistem pemerintahan yang sangat sentralistis di Indonesia. Tetapi, perubahan konteks internasional, khususnya ekonomi-politik global yang kita kenal krisis moneter tahun 2008-an, perubahan struktur sosial domestik dengan makin berkembangnya kelas intelektual menengah perkotaan di Indonesia, dengan cepat menggerogoti wibawa dan kemampuan negara.



*Bapak dan Ibu, hadirin yang saya hormati,*

Reformasi politik tahun 2008 telah menghasilkan perubahan yang mendasar dalam tatanan ekonomi politik di Indonesia. Meningkatnya derajat partisipasi masyarakat membuat manajemen publik (birokrasi) tidak mungkin lagi dilaksanakan secara represif dan hegemonik. Pemerintah pusat harus mengakomodasi berbagai perbedaan yang riil ada di daerah menyangkut kewilayahan, karakteristik demografi, karakteristik sosial budaya, karakteristik potensi ekonomi dan sumber daya alamnya serta berbagai *local indigenius* yang ada. Mengakomodasi hal ini, pilihan pelaksanaan otonomi daerah merupakan pilihan yang tepat yang dilakukan dengan mendesentralisasikan berbagai urusan pemerintahan kepada daerah kecuali beberapa urusan yang menyangkut kebijakan umum seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan fiskal serta agama dan budaya.

Dalam kerangka desentralisasi ini dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah maka hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur oleh undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pascareformasi, dalam masyarakat partisipatif yang terbuka dan bebas, kian kesulitan merumuskan kepentingan bersama atau kepentingan umum secara substantif yang bisa disetarakan dengan tradisi yang diwarisi dan dipertahankan dari satu generasi ke

generasi berikutnya, yang mengatasi kepentingan individu dan kelompok demi kepentingan bersama.

Masyarakat modern justru dikembangkan di atas landasan pengakuan kebebasan kelompok, bahkan individu atau hak asasi manusia (HAM). Kepentingan umum harus diformulasikan bersama antar kelompok, dinegosiasikan dengan penuh kesabaran secara partisipatoris dalam bentuk prosedur-prosedur yang adil dan emansipatoris yang terkadang mengalahkan muatan substantifnya. Artinya, kepentingan umum merupakan hasil kreasi artifisial, yang lebih merupakan *the best possible* yang bisa dicapai dalam suatu interaksi yang dinamis daripada sesuatu yang diintervensikan secara hegemonik demi mempertahankan substantif.

Kepentingan umum dalam negara demokratis pascareformasi memang rentan menghadapi konflik, baik yang menyangkut tujuan pemerintahan (melindungi kepentingan individu dan persaingan bebas versus tindakan afirmatif untuk melindungi yang lemah), mekanisme pengambilan keputusan (mayoritas versus kebersamaan/musyawarah), maupun pengukuran substansi (mengikuti sentimen mayoritas versus pembuktian ilmiah, objektif, rasional).

*Bapak dan Ibu, hadirin yang saya hormati,*

Menghadapi perubahan di atas, birokrasi sebagai pelaksana fungsi pemerintahan harus merubah karakter serta gaya pemerintahannya. Pemerintah tidak lagi bisa mendesak regulasi yang dibuat secara hegemonik tanpa memperoleh persetujuan politik masyarakatnya meskipun secara substantif penting dan mendesak dilaksanakan. Pemerintah harus menegosiasikan dan melaksanakan prosedur partisipatif dalam memperjuangkan kebijakan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan dukungan politik masyarakat.

Faktanya memang kepercayaan masyarakat kepada manajemen publik cenderung makin merosot seiring perkembangan

demokratisasi, karena terkait beberapa hal berikut: (i) adanya perpecahan dan persaingan sosial politik yang mempengaruhi kinerja dan soliditas birokrasi, khususnya dampak PILKADA (ii) berkembangnya *euphoria* kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat, dan berorganisasi di kalangan masyarakat luas (iii) berkembangnya kebebasan pers, (iv) terjadinya kemerosotan ekonomi, (v) mudahnya dilakukan perbandingan dengan kemajuan negara tetangga, (vi) terungkapnya kebohongan-kebohongan yang dilakukan para elite pemerintah, termasuk meningkatnya praktik korupsi.

Menghadapi krisis kewibawaan ini dengan didukung oleh kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat maka pilihan perubahan paradigma pemerintahan menuju *New Public Manajemen* menjadi pilihan yang sangat rasional. Pemerintah daerah harus segera berbenah dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan domestik maupun internasional yang berlangsung secara cepat. Pemerintah daerah harus mengejar dan meraih kepercayaan (legitimasi) masyarakat dengan mengadaptasi perubahan-perubahan yang menjadi tuntutan masyarakat. Intinya, pemerintah daerah tidak lagi bisa memaksakan tentang apa yang terbaik bagi masyarakat melainkan harus melakukan negosiasi kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur/kelompok di masyarakat.

Untuk meningkatkan derajat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah maka upaya-upaya *benchmark* terhadap kinerja pelayanan institusi privat (swasta) yang telah terbukti mampu memuaskan kepentingan masyarakat perlu diadopsi dalam praktek pemerintahannya. Untuk inilah maka dalam paradigma *New Public Management*, slogan seperti *reinventing government*, *market based public administration*, *managerialism*, *post-bureaucratic paradigm*, *entrepreneurship government*, *good governance*, *new governance*, dan sebagainya menjadi pilihan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan legitimasinya.

*Bapak dan Ibu, hadirin yang saya hormati,*

Bagaimana respons yang harus dilakukan pemerintahan di daerah dalam menghadapi tuntutan masyarakat untuk semakin pro kepentingan lokal/daerah dengan kenyataan persaingan eksistensi kebijakan daerah di tingkat global?

Pemerintah di daerah merupakan pemerintahan yang riil berhadapan dengan masyarakat. Dalam kesehariannya menghadapi dinamika perubahan riil di masyarakat yang harus diakomodasi meskipun di sisi lain menghadapi berbagai kendala internal kapasitas pemerintahan daerah yang meliputi: (i) adanya keterbatasan keuangan daerah, (ii) pergeseran ideologis dari negara ke pasar, (iii) menghadapi globalisasi, (iv) kegagalan Negara dalam mensejahterakan masyarakat, (v) kompleksitas perubahan sosial yang terus meningkat, (vi) makin pentingnya peran sumber-sumber lokal dibanding nasional dan global serta (viii) warisan akuntabilitas politik pemerintahan sebelumnya.

Pemerintahan daerah di satu sisi telah mendapatkan eksistensinya melalui penerapan kebijakan desentralisasi dalam otonomi daerah, namun di sisi lain persoalan tuntutan dari masyarakat yang dihadapi melahirkan beberapa dilema yang sulit untuk disiasati. Sebagai contoh, tuntutan untuk menjadikan pemerintahan bertindak propasar, bahkan apa yang dipopulerkan sebagai mewirausahakan birokrasi (*reinventing bureaucracy*), cenderung melahirkan sejumlah dilema. Di antaranya: otonomi entrepreneur versus akuntabilitas demokratis, visi entrepreneurial versus partisipasi warga negara, kerahasiaan entrepreneurial versus keterbukaan demokratis, dan keberanian mengambil risiko entrepreneurial versus pengawasan demokratis (*democratic stewardship*).

Pada umumnya pelaku bisnis demi keberhasilan bisnisnya tentu memerlukan otonomi dalam pengambilan keputusan, mengikuti visi dan pertimbangan atau perhitungan bisnisnya sendiri yang

seringkali tak sejalan atau kurang dipahami orang kebanyakan yang ingin berpartisipasi. Lebih dari itu, seringkali juga diperlukan keberanian bertindak, keberanian mengambil risiko, dan ada kalanya harus merahasiakan strategi dan keputusannya.

Aspek-aspek seperti di atas tentu tak sepenuhnya sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Dalam pemerintahan yang demokratis, kontrol dan partisipasi publik menjadi sesuatu yang vital. Karena itu juga keterbukaan, dan mementingkan tindakan yang aman daripada yang berisiko. Artinya, kewirausahaan pemerintahan tentu harus dilakukan hati-hati dan harus dipahami sebagai pewirausahaan plus, yaitu tetap menjunjung tinggi tanggung jawab kewarganegaraan (*civic-regarding entrepreneurship*). Masih banyak dilema lainnya, seperti antara memenuhi tuntutan publik dengan pertanggungjawaban administratif sebagai aparat birokrasi di daerah.

Di era globalisasi ini tata pemerintahan menjadi sangat terbuka dan reaktif terhadap perubahan domestik maupun internasional. Persoalan pemerintahan daerah tidak lagi dapat dibatasi dalam skala lokal ataupun regional, namun harus juga memperhitungkan arah kebijakan di tingkat nasional bahkan internasional. Ada tuntutan bagi aparat birokrasi di pemerintahan daerah untuk responsif dengan berbagai tuntutan dan arah kebijakan yang dinamis tersebut. Aparat birokrasi daerah dituntut untuk dapat melaksanakan jargon '*think globally, act locally*'.

*Bapak dan Ibu, hadirin yang saya hormati,*

Berfikir global kiranya cukup mudah dipahami, bahwa kini telah terjadi koneksi-koneksi global, dan dengan berbagai aspek seperti kebudayaan, ekonomi, dan perubahan politik global telah mempengaruhi kehidupan, termasuk kehidupan komunitas-komunitas lokal. Tetapi, apa yang kita maksud dengan bertindak lokal? Bertindak lokal telah menjadi isu dalam manajemen publik

karena adanya empat faktor yang saling berhubungan: adanya situasi baru, kebijakan dan program baru, peran baru, dan gagasan baru dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan lokal.

Pengaruh ekonomi global ternyata berbeda-beda di tempat yang berbeda, menciptakan peluang kesejahteraan di satu tempat, tetapi menghilangkannya di tempat lain. Ini memberi alasan pentingnya bertindak lokal. Selain itu, juga karena pentingnya menjaga kohesi lokal dan koherensi dalam kebijakan publik. Lebih penting lagi adalah perlunya memberikan penghargaan pada keanekaragaman dalam perumusan dan implementasi kebijakan agar sensitif gender, ras, etnisitas, agama, kelas sosial, kelompok minoritas dan kurangberdayaan khususnya masyarakat miskin dan tertinggal.

Bertindak lokal berarti meniscayakan upaya mobilisasi dan manajemen komunitas-komunitas lokal untuk secara efektif mempengaruhi isu-isu lokal di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta peduli terhadap kehidupan yang inklusif, purposif, dan efektif. Upaya-upaya seperti ini memerlukan peran-peran pemerintah daerah yang memahami permasalahan di daerahnya secara lebih baik dan tepat sasaran ketimbang pemerintahan pusat yang sentralistis serta menemukan cara-cara baru sebagai inovasi (*best practice*) dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah yang lebih baik dan lebih bermakna bagi masyarakatnya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pada tingkat lokal, kian meniscayakan keterlibatan lebih dari sekadar institusi-institusi pemerintahan belaka. Kapasitas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang efektif haruslah mencakup sebuah pencampuran yang kompleks antara institusi dan kepentingan negara, komunitas, dan pelaku pasar, serta kualitas hubungan di antaranya menjadi krusial. Yang krusial dalam *local governance* adalah bagaimana organisasi-organisasi tersebut (*stakeholders*) saling berhubungan satu dengan yang lain? Bagaimana mereka berhubungan dengan masyarakat? dan cara-cara seperti apa untuk memberikan dukungan kebijakan kepada masyarakat?

Ada empat tipe *governance*: tipe prosedural menekankan pentingnya hukum, aturan, keterpercayaan, dan universalitas. Tipe manajerial, sesuai namanya, menekankan pentingnya manajemen, perencanaan, tujuan dan target-target. Tipe pasar menekankan pentingnya persaingan, kontrak dan harga. Sedangkan tipe jejaring menekankan pentingnya hubungan (*relationship*), kerja bersama atau ko-produksi, fleksibilitas, peran penengah, dan diplomasi atau negosiasi.

*Bapak dan Ibu, hadirin yang saya hormati,*

Gagasan *network governance* diturunkan dari dua tradisi intelektual yang berbeda: kepustakaan studi kebijakan dan kepustakaan studi organisasi. Studi kebijakan menekankan bahwa pembuatan dan implementasi kebijakan yang efektif terbentuk melalui kolaborasi antara para pejabat dan kepentingan-kepentingan yang terorganisasi. Sementara itu, kepustakaan tentang organisasi menekankan pentingnya jejaring dalam membangun kualitas sistem pelayanan dan mengembangkan keterkaitan efektif antar-organisasi.

Keterampilan yang dibutuhkan oleh aktor-aktor yang bekerja dalam proses '*network governance*' mencakup keterampilan interpersonal yang baik, kemampuan untuk persuasi, kemampuan berperilaku atas dasar pertukaran saling menguntungkan, dan kemampuan mengkonstruksi hubungan-hubungan berjangka panjang. Keterampilan tersebut pada umumnya dipelajari oleh para pekerja sosial atau aktivis pengembangan masyarakat. Dalam kepustakaan manajemen sektor publik berbagai keterampilan itu disebut sebagai keterampilan 'diplomat'. Untuk dapat membangun jejaring yang sinergis dan efektif, pemerintah daerah harus mampu mengajak berbagai komponen untuk merumuskan fokus dan prioritas bersama, kemudian berbagi peran secara jelas (*Role Sharing*).

Di sini pemerintah lokal harus memberdayakan semua potensi komunitas di daerahnya. Kata "partisipatif" dapat digunakan untuk menjelaskan pola hubungan ideal antara pemerintah daerah dan jejaring komunitas baik di level lokal, regional, nasional maupun global. Meskipun terkesan bertele-tele dan tidak efektif tetapi keterlibatan jejaring komunitas masyarakat sangat penting untuk meningkatkan legitimasi program maupun legitimasi kepemimpinan di daerah. Jika ini dilaksanakan maka pemerintah daerah tidak sekedar melaksanakan program-program pembangunan yang monoton dari tahun ke tahun, namun secara progresif pemerintah daerah melaksanakan fungsi pemerintahannya secara efektif dan berpihak pada pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh komunitas-komunitas lokal di daerahnya untuk dikembangkan dalam skala global.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal yang peduli untuk memberdayakan potensi lokal, ada sepuluh tema sentral *local governance* yang penting diperhatikan sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan pemerintahan lokal yang efektif harus dimulai dengan memahami kompleksitas institusi dan kepentingan lokal. Komunitas lokal bukanlah tak terdiferensiasi. Tugas pokok *local governance* adalah mengembangkan jejaring dan hubungan kerja yang efektif di antara institusi negara, komunitas, dan pasar, serta kelompok-kelompok untuk peduli dan menghadapi isu-isu lokal.
2. Pemerintahan lokal yang efektif harus mendasarkan pada penghargaan akan kekhususan tempat: kekhususan konfigurasi kebutuhan sosial, permasalahan, aspirasi, institusi dan kepentingan di setiap tempat. Kebijakan harus menghargai keanekaragaman tempat, menyediakan ruang bagi institusi lokal untuk ikut mempengaruhi implementasi dan pelayanan.
3. Pemerintahan lokal harus peduli pada pengembangan kapasitas semua institusi lokal yang relevan, termasuk institusi negara, komunitas, dan pasar serta antar-hubungan di antaranya. *Local*



*governance* perlu aktif, menggunakan negara, memperkuat organisasi komunitas, dan memperkuat institusi ekonomi. Mengembangkan struktur dan proses yang efektif untuk mempermudah kolaborasi dan kerja bersama amatlah penting.

4. Pemerintahan lokal mendasarkan manajemen melalui negosiasi dan jejaring daripada metode tradisional kontrol hirarkhis atau model-model kompetitif dan pasar. Harus meningkatkan saling ketergantungan antara sektor publik, pasar, dan masyarakat sipil, interaksi antar anggota jejaring harus didasarkan pada kepercayaan, pertukaran sumberdaya, proses yang dinegosiasikan dan berbagi hasilnya.
5. Perlu meningkatkan kapasitas semua anggota komunitas, dengan berbagai keahlian dan pengetahuan, termasuk pengetahuan lokal demi peningkatan kolektif dalam proses perencanaan deliberatif.
6. Tradisi usaha lokal merupakan dimensi *local governance* yang penting. Institusi-institusi lokal, apakah negara, pasar atau komunitas perlu memiliki kultur usaha dan proaktif menyikapi isu dan permasalahan lokal.
7. Pemerintahan lokal harus peduli dengan cara-cara agar semua warga dapat berpartisipasi, proses peningkatan demokrasi lokal, dan menyediakan berbagai kesempatan agar warga berpartisipasi dalam inisiatif dan proyek lokal, dan ikut menentukan prioritas, program, dan kebijakan lokal.
8. Pemantauan dan pengukuran perangkat *local governance* lebih difokuskan pada hasil-hasil yang disetujui komunitas daripada berdasarkan masukan dan keluaran yang diperlukan.
9. Berbagai persoalan yang sebelumnya dipandang terlepas harus dihadapi bersama oleh institusi dan aktor dari sektor negara, pasar, dan komunitas untuk diuji dari perspektif baru. Khususnya, diperlukan mengaitkan kebijakan lingkungan, ekonomi, dan sosial di tingkat lokal.

10. Pemerintahan lokal bukanlah kerangka sederhana untuk sebuah pendekatan baru manajemen sektor publik. Pada intinya untuk meningkatkan kapasitas lokal untuk memperbaiki hasil sosial, ekonomi, dan lingkungan, khususnya di wilayah telah terjadi eksklusi sosial. Sebuah pendekatan relasional dan multi-dimensional untuk mengurus dan mengelola sektor publik, privat, dan komunitas diperlukan demi merespon isu dan kebutuhan komunitas yang multi-dimensional dalam suatu konteks spasial.

*Bapak dan Ibu, hadirin yang saya hormati,*

Sekarang, bagaimana peran perguruan tinggi sebagai salah satu komunitas intelektual dalam mendorong efektivitas *local governance* tersebut? Sudah selayaknya jika perguruan tinggi tidak hanya berpangku tangan atau sebatas memberikan kritik-kritik semata terhadap hiruk pikuk pelaksanaan pemerintahan di daerah. Sebagai institusi yang memiliki kapasitas dalam pengkajian ilmiah, selayaknya perguruan tinggi mampu memetakan serta menganalisis persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah pascareformasi ini. Tidak cukup memberikan peta analisis, namun melalui serangkaian pengabdian masyarakatnya, perguruan tinggi secara simultan selayaknya berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pemerintahan di daerah.

Bagaimana mekanismenya, tentu harus dibicarakan secara seksama dalam kerangka partisipatif tersebut. Intinya, janganlah perguruan tinggi mengintervensi terlalu dalam terhadap kinerja pemerintahan di daerah namun juga jangan hanya *hit and run* dalam memberikan perannya menghadapi permasalahan di pemerintahan daerah, apalagi hanya dilaksanakan secara singkat dan lebih banyak seremonial. Harusnya melalui sebuah mekanisme pendampingan yang simultan dan menyeluruh dengan durasi waktu yang mencukupi.

*Bapak dan Ibu, hadirin yang saya hormati,*

Saya merasa bangga menjadi bagian dari Universitas Airlangga yang berkesempatan dalam memberikan kontribusi terhadap upaya memberi solusi terhadap permasalahan riil yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik. Semangat yang terpancar dari "*Excellence with morality*" yang merupakan '*benchmark*' universitas Airlangga telah menyemangati saya untuk melakukan pengabdian, tidak hanya berkutat di dalam pengabdian akademis di dalam kampus, lebih dari itu saya termotivasi untuk melakukan pengabdian di luar kampus dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas pembangunan di daerah secara berkelanjutan.

Semoga apa yang telah saya lakukan dapat menjadi perwujudan ucapan terima kasih saya kepada Universitas Airlangga yang telah memberikan tempat dan posisi terhormat sebagai Guru Besar di bidang Politik Lokal dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah membesarkan nama baik Universitas Airlangga.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Di bagian akhir pidato pengukuhan ini, saya memaknai, jabatan Guru Besar ini adalah pernghargaan, amanah dan tanggung jawab akademis yang harus saya pertanggungjawabkan sebagaimana tuntutan Tri Dharma pendidikan tinggi. Saya mensyukuri rahmat Allah SWT yang atas segala karunia-Nya memberikan kesempatan menempuh pendidikan, melalui ustad dan ustadzah, guru-guru saya ketika di madrasah, SD, SMP, SMA dan Dosen di segala jenjang pendidikan tinggi, kolega pekerjaan, sahabat dan keluarga. Jabatan Guru Besar ini saya raih atas bantuan beliau-beliau yang terhormat.

Saya menyadari sepanjang karir pendidikan dan pekerjaan saya sampai pada Guru Besar ini, tidaklah mungkin saya raih tanpa bantuan dan dukungan beliau-beliau baik secara langsung

maupun tidak langsung. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan rasa terima kasih kepada semua yang telah berjasa di dalam hidup saya.

*Pertama*, kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memegang jabatan Guru Besar dalam bidang Politik Lokal.

*Kedua*, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua para guru SD, guru SMP, guru SMA dan para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya di Program Studi Ilmu Politik Universitas Airlangga yang kemudian saya bergabung di dalamnya, para dosen di Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada khususnya Dr. Afan Gaffar, Drs., MA, (Alm), Prof. Dr. Ichlasul Amal, Drs., MA dan Prof. Dr. Mohtar Mas'ood, Drs., MA. Dan para dosen di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya khususnya Prof. Dr. Riyadi Suprpto, Drs., MA (Alm), Prof. Solichin Abdul Wahab, Drs., MA., Ph.D (Alm), Prof. Dr. Irfan Islamy, Drs., MA (Alm), Prof. Dr. Saladien, Drs., MA (Alm) dan Prof. Dr. Susilo Zauhar, Drs., MA.

*Ketiga*, Kepada Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga, Prof. Dr. Fendy Suhariadi, MT., S.Psi saya menyampaikan terima kasih, beliau telah berkenan menyetujui pengusulan saya sebagai Guru Besar ke-9 di FISIP Unair.

*Keempat*, Terima kasih untuk para mantan Rektor dan Rektor Universitas Airlangga, yang telah menerima saya menjadi bagian Sivitas Akademika Universitas Airlangga, yang terhormat Prof. Soedarso Djojonegoro, dr., Ph.D., Prof. Dr. Bambang Rahino Setokoesoemo, dr., Prof. Dr. Soedarto, DTM&H., Prof. Dr. Puruhito, dr. dan Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. H. Fasich, Apt., para Wakil Rektor, para Direktur di lingkungan Universitas Airlangga sekali lagi terima kasih.

*Kelima*, ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Dekan FISIP-Unair, I. Basis Susilo, Drs., MA., dan Wadek I, Dr.

Dwi Windyastuti, Dra., MA, Wadek II Drs. Karnaji, MSi., Wadek III Drs. Vincentio A. Dugis, MA., Ph.D., juga kepada Prof. Dr. Hotman Siahaan, Prof. Dr. L. Dyson, M.A., Prof. Dr. IB Wirawan, Drs., MA., Prof. Dr. Mustain Mas'oe'd, Drs., MSi., Prof. Dr. Drs. Yusuf Irianto, M.Com. Dra. Toetik Koesbardiyati, MA., Ph.D., Dr. Siti Aminah, Dra., MA. dan Wisnu Pramutanto, Drs., MS. yang telah berkenan menyetujui pengusulan saya sebagai Guru Besar di FISIP-Unair.

*Keenam*, kepada yang terhormat, Bapak Prof. Soetandyo Wignjoseobroto, MPA (alm.), yang telah mengajarkan kerja keras dalam berkarir di dunia pendidikan. Demikian pula kepada bapak R. Koento, dr., MA (alm.) dan J. Dwi Narwoko, Drs., MA, Machsun Ali, SH., MS., Ibu Sri Sanituti Hariadi, SH., MS, kepada guru dan sejawat saya di Departemen Politik Prof. A. Ramlan Surbakti, MA., Ph.D., Prof. Kacung Marijan, MS., Ph.D., Drs. Sutrisno, MS., Drs. Priyatmoko, MA., Drs. Aribowo, MA., Drs. Wisnu Pramutanto, Msi., Drs. Haryadi, MA., Dr. Dwi Windyastuti BH, Dra. Msi., Dr. Kris Nugroho, Drs. MA., Dr. Siti Aminah, Drs., MSi., Drs. Muhamad Asfar, MSi., Airlangga Pribadi, SIP, MA., Ucu Martanto, SIP, MSi, Ali Shahab, SIP, MSi., Fahrul Muzakki, SIP, MSi dan Hari Fitrianto, SIP, M.Si. yang telah bekerja sama dengan penuh rasa kolegal selama ini. Demikian pula kepada seluruh staf Kependidikan di FISIP-Unair, tanpa dukungan bapak/ibu semua tidak akan mungkin saya ada di ruangan yang terhormat ini.

*Ketujuh*, kepada para teman dan kolega di bidang akademis maupun pemerintahan, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan termasuk kehadiran dalam pengukuhan Guru Besar ini, semoga hubungan ini menjadi lebih baik di masa-masa mendatang.

*Kedelapan*, kepada ayah dan ibu saya tercinta, W. Siswo Utomo (alm.) dan Hj. Soedjaroh (alm.) meskipun tidak bisa menghadiri acara ini tapi saya yakin beliau menyaksikan dengan bahagia dari sana dan Bapak Ibu Mertua yang berbahagia hari ini, H. Herman Sutari dan Hj. Soepilah saya mengucapkan hormat dan terima kasih atas bimbingannya. Demikian pula kepada semua saudara-saudara

sekandung maupun saudara ipar dan keluarga besar Bani Astro Shaleh Kediri dan keluarga mbah Guru Atmosuwito Ngawi terima kasih atas dorongan dan doa yang diberikan.

*Kesembilan*, khusus kepada isteri saya tercinta, Dra. Aryanthi Jauhartina, M.Pd., yang telah menemani saya dalam suka dan duka dan kerelaan berkorban demi cita-cita saya. Kesabarannya sangat besar, sejak saya mulai studi lanjut dan Insya Allah sampai kita bersama berusia lanjut. Anak-anakku, Prima Hapsari Wulandari, Yudhistira Gusti Dharmawan, Intan Triatmaja Kusumawati dan si kembar Sekar Fajar Lestari dan Sekar Fajar Handayani, terima kasih dukungan dan pengertiannya selama ini.

*Kesepuluh*, kepada Seluruh sahabat kolega dosen dan mahasiswa yang telah bersusah payah menjadi panitia untuk membantu acara pengukuhan ini, baik dari FISIP, Fakultas Kedokteran maupun Fakultas SAINTEK, sungguh saya ucapkan terima kasih yang tulus. Semoga Allah swt. membalas budi dan amal bapak dan ibu serta saudara semua. Amin.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran para hadirin dalam mengikuti prosesi pengukuhan guru besar ini dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan.

*Wassalamu'alaikum warochmatulloohi wabarokatuh*

## DAFTAR BACAAN

- Abdul Wahab, Solichien. 1997. Analisis Kebijakan Negara dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *dkk.* 2002. Masa Depan Otonomi Daerah: Kajian Sosial Ekonomi dan Polititik untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah, Penerbit SIC. Surabaya.
- Batten, T.R. 1960. *Communities and Their Development*, Oxford University Press. London.
- Harmon, M.M. 1969. *Administrative Policy Formulation and Public Interest*, Hasper & Row. New York.
- Dirdjosuseno, Priyatmoko, Peran Aparatur Negara dalam Pembangunan Di Masa Pascareformasi, Makalah, FISIP-Unair, 2002.
- Ramachandran, H & J P De Campos Guimaraes. 1991. *Integrated Rural development In Asia: Learning From Recent Experience*, First Published. Concept Publishing Company. New Delhi.
- Sabatier, P. and HC Jenkins-Smith (eds). 1993. *Policy Change and Learning An Advocacy Coalition Approach*, Westview Press. San Francisco.
- Topatimasang, Roem, Mansour Fakhri, Toto Raharjo. 2005. *Mengubah Kebijakan Publik*, Insist Pers. Yogyakarta.





## RIWAYAT HIDUP

Nama : Prof. Dr. Drs. Budi Prasetyo, MSi.  
Tempat/Tanggal lahir : Kediri, 19 Juli 1965  
Agama : Islam  
Orang tua : W. Siswo Utomo (Alm), Hj. Soedjaroh (Alm)  
Tempat Tinggal : Larangan Mega Asri B-127 Sidoarjo  
(031-8953958)  
Nama Isteri : Dra. Aryanthi Jauhartina, M.Pd.  
Anak : 1. Prima Hapsari Wulandari  
2. Yudhistira Gusti Dharmawan  
3. Intan Triatmaja Kusumawati  
4. Sekar Fajar Lestari  
5. Sekar Fajar Handayani

## RIWAYAT PENDIDIKAN

### Pendidikan Dasar dan Menengah

1. SD Negeri Rembang, tamat tahun 1977 di Kediri, Jawa Timur
2. SMP Negeri Ngadiluwih, tamat tahun 1981 di Kediri, Jawa Timur
3. SMA Negeri 2 Kediri, tamat tahun 1984 di Kediri, Jawa Timur

### Pendidikan Tinggi

1. Studi S1, Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, tamat tahun 1989
2. Studi S2, Ilmu Politik, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, tamat tahun 1996
3. Studi S3, Ilmu Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Brawijaya, tamat tahun 2006

## RIWAYAT PEKERJAAN DAN JABATAN

1. Tanggal 3 Januari 1990 diangkat sebagai CPNS di FISIP-Unair
2. Tanggal 3 Januari 1992 sebagai Asisten Ahli Madya (III/a) di FISIP-Unair
3. Tanggal 1 Oktober 1998 sebagai Lektor (III-C) di FISIP-Unair
4. Tanggal 1 Oktober 2005 sebagai Lektor Kepala (IV-A) di FISIP-Unair
5. Tanggal 1 April 2014 sebagai Guru Besar FISIP-Unair
6. Tanggal 19 Juli 2011 sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Politik FISIP-Unair

## KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Mata Kuliah	S	Institusi	Tahun
Politik dan pemerintahan Lokal	S1	FISIP Universitas Airlangga	1990-1993
Politik di Desa	S1	FISIP Universitas Airlangga	1990-1993
Sistem Politik Indonesia	S1	FISIP Universitas Airlangga	1997-sekarang
Pembangunan Politik	S1	FISIP Universitas Airlangga	1997-2009
Seminar Masalah Politik & Pemerintahan	S1	FISIP Universitas Airlangga	1997-2003
Hubungan Birokrasi dan Politik	S1	FISIP Universitas Airlangga	2009-sekarang
Demokrasi dan Demokratisasi	S1	FISIP Universitas Airlangga	2009-sekarang
Proses Politik dan Teknik Perundangan	S1	FISIP Universitas Airlangga	2009-sekarang
Pengantar Ilmu Politik	S1	FISIP Universitas Airlangga	2007- 2010

<b>Mata Kuliah</b>	<b>S</b>	<b>Institusi</b>	<b>Tahun</b>
Politik Tata Ruang	S2	FISIP Universitas Airlangga	2007-sekarang
Teori Perencanaan Pembangunan	S2	FISIP Universitas Airlangga	2007-sekarang
Teori dan Analisis Kebijakan Publik	S2	FISIP Universitas Airlangga	2007-sekarang
Good Governance	S2	FISIP Universitas Airlangga	2011-sekarang
Manajemen Strategik Sektor Publik	S2	FISIP Universitas Airlangga	2011-sekarang
MSDM dalam Sektor Publik	S2	PSDM Pasca Unair	2011-sekarang
Teori Pelayanan Sektor Publik	S2	PSDM Pasca Unair	2011-sekarang
Analisis Kebijakan Sektor Kesehatan	S2	FKM Univ. Airlangga	2013-sekarang

## **PENGALAMAN PENELITIAN**

- 2006 : Studi *Role Sharing* Pada Pengelolaan DAS Bondoyudo – Mayang. LPPM Unair & Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Tim Leader.
- 2007 : Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah: LPPM Unair & Bappeda Kabupaten Lamandau, Ketua Peneliti.
- 2008 : Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: LPPM Unair & Bappeda Kabupaten Lamandau, Ketua Peneliti.
- 2009 : Studi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (RETIKATPATDA): LPPM Unair & DPPKAD Kabupaten Lamandau, Ketua Peneliti.

- 2010 : Rencana Strategik Pengembangan Pasar Ekspor Industri,. LPPM-Unair dan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya Mineral. Sebagai Ahli Kelembagaan.
- 2011 : Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. LPPM Unair & Bappeda Kabupaten Lamandau, Ketua Peneliti.
- 2012 : Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. LPPM-Unair dan Bidang Organisasi Pemda Pasuruan. Sebagai Ahli Kelembagaan.
- 2013 : Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Keselamatan Lalu Lintas Jalan. FISIP-Unair dan Komisi D Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, Sebagai Ahli Kelembagaan.

#### **PUBLIKASI ILMIAH**

- 2005 : Evaluasi Jabatan Fungsional, Buku Monograf, Penerbit Lutfansyah Mediatama, Surabaya, (ISBN: 978-979-16674-2-5)
- 2006 : Memahami Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang. Jurnal Wacana Pascasarjana UB Malang, Akreditasi: No.49/Dikti/Kep/2003 dengan ISSN: 1411, Vol. 9. No. 3 Malang, Desember 2006
- 2007 : Mengkaji Renstra Gardu Taskin, Buku Monograf, Penerbit Karya Indah, Surabaya, (ISBN: 978-979-16674-4-9)
- 2008 : Orientasi Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik, Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik. Fisip-UNAIR, Akreditasi: 56/Dikti/Kep/2005 dg ISSN: 0216-2407, Edisi th. XXI: No.2, April-Juni 2008
- 2009 : Strategi Pengembangan Kawasan Potensial, Buku Monograf, Lutfansyah Mediatama, Surabaya, (ISBN: 978-979-16674-5-6)

- 2010 : Rencana Strategi Pengentasan Kemiskinan, Buku Monograf, Penerbit Karya Indah, Surabaya, (ISBN: 978-979-16674-6-3)
- 2011 : Proses Politik dan Teknik Perumusan Undang-Undang, Buku Ajar, Surabaya, November 2011, (ISBN: 978-979-16674-7-0)
- 2012 : Kajian Teoretik Karakter Kebijakan Publik, Jurnal Politik Indonesia, Fisip-UNAIR, dg ISSN: 2303-2073
- 2013 : Kebijakan *Standard Operating Prosedur* dan Prosedur Pengelolaan Kebersihan Perkotaan, Buku Monograf, Penerbit Karya Indah, Surabaya, (ISBN: 978-602-8246-12-5)

### **KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

- 2006 : Menjadi Pembicara Kegiatan Pengmas Pada Kegiatan Diseminasi Eksekutif Pembangunan Bendungan Blega Madura, Kerjasama Balai Besar SNVT Brantas Wiyung dan LPPM Unair, surat tugas nomor: 317a/J03.3/PM2006
- 2007 : Menjadi Pembicara Kegiatan Pengmas Pada Kegiatan Penyusunan Kebijakan Program Dasar Pembangunan Partisipatif, LPPM-Universitas Airlangga; Surat Tugas, nomor: 172/J03.3/PM/2007
- 2008 : Menjadi Pembicara Kegiatan *Workshop of Education Measurement/WEM*, P4UA, Surat Tugas, nomor: 424-B/j03.1.13/PP/2008.
- 2009 : Menjadi Pembicara Kegiatan Bintek Pendalaman Tugas pokok dan Fungsi Anggota DPRD, FISIP-Unair, Surat Tugas, nomor: 278/J03.1.13/KP/2009.
- 2010 : Menjadi Pembicara Kegiatan Bintek Pengawasan DPRD dan Kinerja Eksekutif Daerah, FISIP-Unair, Surat Tugas, nomor: 2527/J03.1.13/KP/2010.

- 2011 : Menjadi Pembicara Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Partai Politik, Prodi S2 Ilmu Politik, Surat Tugas, nomor: no.2743/H3.1.7/KP/2011
- 2012 : Menjadi Pembicara Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Partai Politik, Prodi S2 Ilmu Politik, Surat Tugas, nomor: no. 2744/H3.1.7/KP/2012
- 2013 : Menjadi Pembicara Kegiatan Pelatihan Optimisme Pemilih Pada Konstelasi Politik Masa Depan, Prodi S2 Ilmu Politik, Surat Tugas, nomor: no. 3561/UN3.1.7/KP/2013

